

TESIS

**ASAS KEADILAN DALAM TRANSISI PERATURAN PERTAMBANGAN
DARI PERJANJIAN MENJADI PERIZINAN**



Diajukan oleh :

Erdiwin Mardani Sihombing
NIM. 2220216310059

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN
2024**

**ASAS KEADILAN DALAM TRANSISI PERATURAN PERTAMBANGAN
DARI PERJANJIAN MENJADI PERIZINAN**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister

Dalam Program Magister Ilmu Kenotariatan

Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

ERDIWIN MARDANI SIHOMBING, S.H

NIM. 2220216310059

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN
2024**

**Tesis ini
Telah diperiksa dan disetujui
Pada tanggal.....**

PEMBIMBING

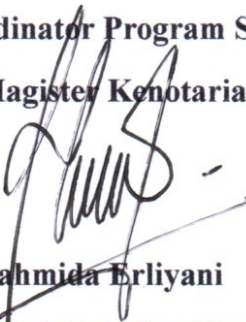


Saprudin

NIP : 19820610 200501 1 002

Diketahui Oleh

**Ketua Koordinator Program Studi
Program Magister Kenotariatan**



Hj. Rahmida Erliyani

NIP : 19730420 200312 2002

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum**



Achmad Faishal

NIP : 19750615 200312 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERDIWIN MARDANI SIHOMBING, S.H.
NIM : 2220216310059
Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat Banjarmasin
Judul Tesis : ASAS KEADILAN DALAM TRANSISI PERATURAN
PERTAMBAHAN DARI PERJANJIAN MENJADI
PERIZINAN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali dicantumkan sebagai kutipan/acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber kutipan/acuan dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan, plagiat maupun manipulasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Dengan pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan dari siapapun.

Banjarmasin, Juli 2024

Yang membuat Pernyataan



ERDIWIN MARDANI SIHOMBING, S.H
2220216310059



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
PROGRAM PASCASARJANA**

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

NOMOR : 536/UN8.4/SE/2024

Sertifikat ini diberikan kepada:

Erdiwin Mardani Sihombing

Dengan Judul Tesis :

Asas Keadilan Dalam Transisi Peraturan Pertambangan dari Perjanjian Menjadi Perizinan

Telah dideteksi tingkat plagiasinya dengan kriteria toleransi $\leq 20\%$, dan dinyatakan Bebas dari Plagiasi.

Banjarmasin, 26 Agustus 2024

Direktur,



Prof. Dr. H. Banang Biyatmoko, M.Si.

NIP 196805071993031020



ASAS KEADILAN DALAM TRANSISI PERATURAN PERTAMBANGAN DARI PERJANJIAN MENJADI PERIZINAN

Oleh :

Erdiwin Mardani Sihombing, S.H.¹, Dr. Saprudin, S.H., LL.M.²
Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRAK

Kata Kunci : Asas Keadilan , Sila Kelima Pancasila, Dasar Keadilan Sosial, Transisi Peraturan Pertambangan, Fase Perjanjian menjadi Fase Perizinan

Pertambangan adalah proses pengambilan sumber daya alam yang terkandung didalam perut bumi, dalam proses ini memerlukan regulasi yang tepat karena berhubungan langsung dengan lingkungan demi terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Peraturan pertambangan di Indonesia adalah wujud dari penguasaan negara atas sumber daya alam yang berkaitan dengan khayalak hidup orang banyak, dalam perjalanan peraturan pertambangan ini mengalami banyak problematika. peraturan pertambangan mengalami perubahan yang sangat signifikan , Materi Muatan Transisi Peraturan Pertambangan berisikan Perubahan substansi kewenangan dan penempatan kedudukan negara. Secara Isi Peraturannya adalah Perubahan dari Hukum Privat yaitu Prinsip Melaksanakannya sebagai Penyelenggara secara Inti Prosesnya melalui Perjanjian (KK/PKP2B) dengan Kedudukan Negara setara dengan Pengusaha Pertambangan menjadi Hukum Publik yaitu Prinsip Melaksanakannya sebagai Penguasa Penuh/Diselenggarakan secara Keseluruhan Prosesnya melalui Perizinan (IUPK) dengan Kedudukan Negara lebih tinggi dengan Pengusaha Pertambangan.

Transisi peraturan pertambangan memiliki arah/tujuan, jangkauan pengaturan/sasaran dan materi muatan peraturan yang berbeda setiap fasenya. Dalam penelitian ini akan mendalami antara pembentukan hukum yang menjadi alat negara untuk menguasai sumber daya alam dengan keadilan, mengapa dalam bernegara dalam hal berhukum perlu mengaitkannya dengan keadilan khususnya dalam peraturan pertambangan

¹ Erdiwin Mardani Sihombing NIM. 2220216310059

² Pembimbing Utama

PRINCIPLE OF JUSTICE IN TRANSITION OF MINING REGULATION FROM AGREEMENT INTO PERMIT

By

Erdiwin Mardani Sihombing¹, Saprudin²

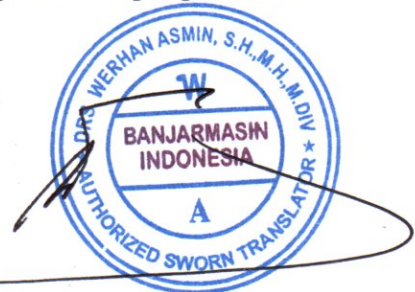
Master of Notary Study Program, Lambung Mangkurat University, 120 pages

ABSTRACT

Keywords: *Principle of Justice, The Fifth Principle of Pancasila, Ground for Social Justice, Transition of Mining Regulation, Agreement Phase into Permit Phase*

Mining is extraction process of natural resources contained in the earth's crust, this process requires accurate regulations because it is directly related to the environment towards the realization of sustainable management of natural resources. The mining law in Indonesia is a manifestation of state domination upon natural resources in connection with the livelihood of many people. In its development the mining regulations have experienced a lot of problems. They have experienced significant changes. The materials of the transition of mining regulations contain amendments which contain amendment on the substances of authority and placement of substance and placement of state position. From the perspective of the content, it is a change of private law, namely the principle to implement it as organizer as the substance of the process through agreement (KK/PKP2B) with State Position equal to mining businessman to become public law, namely the principle to perform it as full ruler/ manage fully its process through permit (IUPK) in which the position of the State is higher than mining entrepreneur. Transition of mining regulations has the direction/ goals, range/ target of regulation and material content of the regulations are different for each phase. This research studies deeper on the law formation which becomes state instrument to dominate natural resources and the principle of justice, why in the state and in the law it is deemed necessary to correlate them justice, particularly in mining regulations.

Certified by,



¹ Student number: 2220216310059.

² Supervisor

Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div
Authorized Sworn Translator

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur pada Tuhan Yesus Kristus atas berkat limpahan kasih dan karunia-Nya ini lah penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Tesis yang berjudul **“ASAS KEADILAN DALAM TRANSISI PERATURAN PERTAMBAHAN DARI PERJANJIAN MENJADI PERIZINAN”**. Penulisan ini bertujuan sebagai syarat tugas akhir pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Lassarus Sihombing dan Ibunda Ursula Primawati dan Adik Yermia Hengki Sihombing serta Yuni Ardino Sihombing yang telah membentuk kepribadian penulis untuk pantang menyerah dalam menuntut ilmu setinggi-tingginya, memberikan semangat, cinta, dan kasih sayang serta memotivasi penulis untuk melanjutkan kejenjang Pasca Sarjana Kenotariatan. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan semangat, do'a, dan dukungan baik moral maupun materil kepada penulis, serta terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan penulis Program Studi Magister Kenotariatan Angkatan 2022.

Dan selama melakukan penelitian ini, penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan serta arahan, selain itu penulis banyak menerima dukungan, motivasi, serta do'a dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. sebagai Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat;

Sekaligus Sebagai Dosen Penguji dari penelitian tesis ini. Terima kasih atas segala kritik dan saran yang telah diberikan dalam penelitian ini. Semoga apa yang telah Bapak berikan dapat menjadi berkah dan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.;

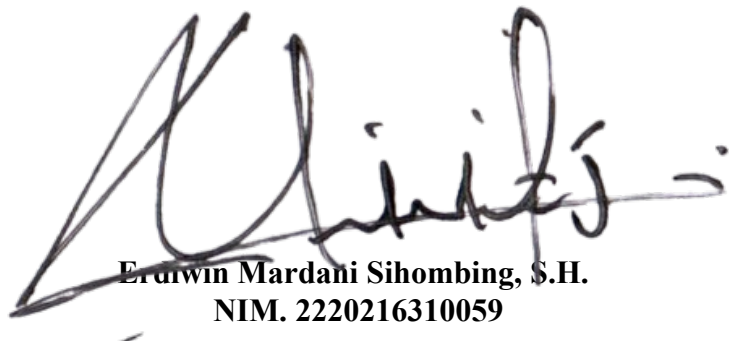
3. Bapak Dr. Saprudin, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing, Terima Kasih atas segala bimbingan, saran, ilmu, arahan, serta waktu yang bapak sediakan untuk Penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga apa yang telah bapak berikan untuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini menjadi berkah dan balasan dari Tuhan Yang Maha Esa;
4. Bapak Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn selaku Tim Penguji dari penelitian tesis ini. Terima kasih atas segala kritik dan saran yang telah diberikan dalam penelitian ini. Semoga apa yang telah Bapak berikan dapat menjadi berkah dan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa;
5. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu selama penelitimelaksanakan perkuliahan;
6. Seluruh Staf Akademik, Staf Keuangan, Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. Pasangan/Sahabat/Teman yaitu Nurfatihmah Azahro yang selalu mendampingi, membantu, mensupport secara Logika maupun Persaaan serta yang terpenting selalu ada ;
8. Teman-teman di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Angkatan 2022; dan

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan informasi dan arahan dalam mewujudkan Penulisan Hukum ini.

Semoga segala yang telah diberikan mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Seperti Pepatah mengatakan : “ Taka da gading yang tak retak “ begitu juga dengan Tesis ini, Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun dalam penelitian ini. Semoga Hasil Penelitian yang penulis buat ini bisa bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dalam ilmu Kenotariatan.

Banjarmasin, Juli 2024

Hormat Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Erwin Mardani Sihombing', written over a horizontal line.

**Erwin Mardani Sihombing, S.H.
NIM. 2220216310059**

DAFTAR PUSTAKA

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
ABSTAK	iv
ABSTRACT	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	35
G. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan	39
BAB II TRANSISI PERATURAN PERTAMBANGAN DARI PERJANJIAN MENJADI PERIZINAN	41
A. Sejarah Perusahaan Pertambangan di Indonesia	41
1. Fase Zaman Kolonial.....	42
2. Fase Orde Lama.....	43
3. Fase Orde Baru	44
4. Fase Reformasi	46
B. Materi Muatan Peraturan dalam Transisi Peraturan Pertambangan Dari Perjanjian Menjadi Perizinan	49

1. Prosedur Pertambangan dengan Fase KK Dan PKP2B (Fase Perjanjian)50
2. Prosedur Pertambangan dengan Fase IUPK (Fase Perizinan)..... 59
3. Prosedur Pertambangan Perpanjangan KK Dan PKP2B (Perjanjian) Menjadi IUPK (Izin)..... 62
4. Muatan Muatan Peraturan dalam Transisi Peraturan Pertambangan..... 65

BAB III KONSEPSI TEORI KEADILAN DALAM TRANSISI

PERATURAN PERTAMBANGAN DARI PERJANJIAN MENJADI PERIZINAN 69

A.Konsepsi Teori Keadilan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia..... 69

B. Teori Keadilan dalam Transisi Peraturan Pertambangan..... 81

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 100

A. KESIMPULAN..... 100

B. SARAN 101

DAFTAR PUSTAKA..... 102

RIWAYAT HIDUP